



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

IKHTISAR EXECUTIVE

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal. Selain Dari 4 (Empat) sasaran strategis, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan Dasar yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, adapun Capaian Sasaran Strategis dan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	100	
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100	
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	100	
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	100	
Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	102	
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	103,5	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
Rata – Rata Kinerja		100,79	

pencapaian sasaran tersebut dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3.959.901.419,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.780.759.540 (95,48%). Capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 100,79%, dan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 7,54%

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ini disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022. Laporan ini pula sebagai bentuk Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal. Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam pelaporan akuntabilitas ini meliputi pengukuran atas realisasi capaian kinerja dari indikator kinerja utama yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. **Realisasi Capaian Kinerja** tersebut telah dihadapkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. **Analisis Kinerja** memuat uraian tentang faktor-faktor pendukung dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Penyusunan LAKIP telah dilakukan sesuai pedoman yang ada. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja ini tepat waktu dan berharap bahwa LAKIP ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Polewali, 10 Februari 2023

Kepala Dinas



Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19631020 199103 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat	2
	C. Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	A. Rencana Strategis	7
	B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	A. Capaian Kinerja Tahun 2022	13
	B. Akuntabilitas Keuangan...	47
BAB IV PENUTUP	A. Kesimpulan	50
	B. Langkah-Langkah Perbaikan kedepan.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I	Perjanjian Kinerja 2022	
Lampiran II	Pengukuran Kinerja 2022	
Lampiran III	Realisasi Anggaran 2022	

Daftar Gambar, Tabel dan Chart

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2
Tabel.2.1	Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	8
Tabel. 2.2	Target Sasaran Strategis yang di tetapkan Dalam Renstra 2019-2024	8
Tabel. 3.1	Capain SPM Tahun 2022	14
Tabel. 3.2	Mutur Pelayanan SPM Tahun 2022	14
Tabel. 3.3	Rincian Anggaran dan Program SPM Tahun 2022	17
Tabel. 3.4	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2022	17
Tabel. 3.5	Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM	18
Tabel. 3.6	Realisasi Sasaran Strategis 1 2022	19
Tabel. 3.7	Daftar Penerima Bantuan PKE Program BSPS dari Balai Penyediaan Perumahan Tahun 2022	20
Tabel 3.8	Daftar Lokasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	21
Tabel 3.9	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022	22
Tabel. 3.10	Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2019-2022 di Kabupaten Polewali Mandar	23
Tabel. 3.11	Realisasi Sasaran Strategis 2 2022	26
Tabel. 3.12	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasann Permukiman	27
Tabel. 3.13	Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi Target RPJMD 2019-2024	28
Tabel. 3.14	Realisasi Sasaran Strategis 3 2022	32
Tabel. 3.15	Data Pengadaan Tanah Tahun 2022	33
Tabel.3. 16	Data Pengadaan Tanah Tahun 2019 - 2021	33
Tabel. 3.17	Data Penerimaan Sertifikat Tahun 2022	34
Tabel. 3.18	Data Luasan Tanah Pemda Bersertifikat Kab. Polewali Mandar Sampai Tahun 2022	37
Tabel. 3.19	Data Penanganan Sengketa Kab. Polewali Mandar Tahun 2022	39
Tabel. 3.20	Realisasi Sasaran Strategis 4 2022	42
Tabel. 3.21	Realiasi Program Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022	47
Tabel. 3.22	Nilai Efisiensi pada Akumtabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022	48
Chart 3.1	Capaian Kinerja Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni Tahun 2019-2022	22
Chart 3.2	Luas Kawasan Kumuh	29
Chart 3.3	Luas Tanah Pemda Bersertifikat 2019-2022	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja instansi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, **partisipasi**, dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud : sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan : adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.



2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

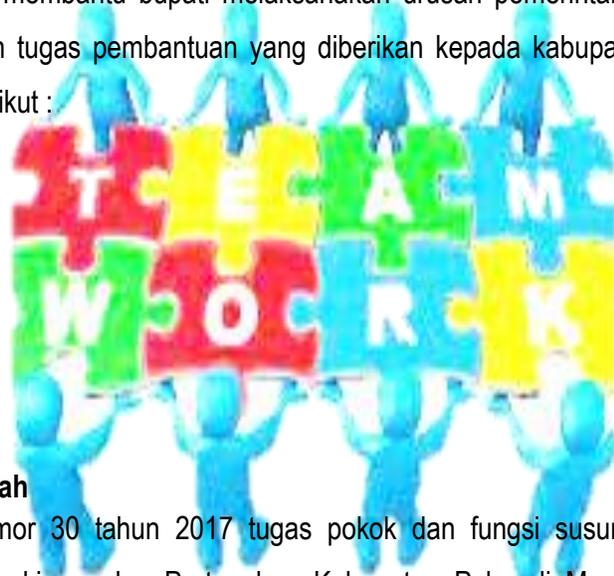
1. Kedudukan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk uraian singkat mengenai apa-apa yang dibebankan kepada instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dari masing-masing bagian dari organisasi.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar maka Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dengan susunan perangkat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas,
- c. Kepala Bidang Perumahan
- d. Kepala Bidang Permukiman
- e. Kepala Bidang Pertanahan



2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok	Fungsi
Membantu bupati dalam melaksanakan urusan perumahan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan2. Pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan3. Pelaksanaan evaluasi pelaporan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Ir. EDY WIBOWO, MM
Kepala Dinas



BAHTIAR, S.STP, M.M
Sekretaris Dinas



PRANUR JASRI, S.AP, M.Si
Kasubag Umum Dan Kepegawaian



HASNAH, SE, M.Si
Perencana



ZETH DIANTO NG, S.IP, M.Si
Kabid Perumahan



ALAMSYAKH FIRDAUS, ST, M.Si
Kabid Permukiman



IDRIS, ST, M.Si
Kabid Pertanahan



RAMLY.P,S,Sos
Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan



NURDARIS PRAWIRA, NEGARANEGARA,ST,MM
Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan



RACHMAYANTI,ST,M.Si
Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan



EMMY RIA TAHANG,S.IP
Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan



MUKHSIN,SE,Sy
Penata Pertanahan



HENNY ASTUTI,HS,S.IP,M.Si
Penata Pertanahan

3. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar T.A 2022 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar Nomor B-04/000.8.6.3/Org/II/2023, tanggal 12 Januari 2023, hal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Memuat penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan)
- B. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (Memuat penjelasan umum tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategi organisasi)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (Memuat penjelasan singkat tentang Renstra, meliputi Visi, Misi, Tujuan sasaran serta Indikator Kinerja utama/sasaran)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2022 (Memuat target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

- 1. Diuraikan per tujuan, per sasaran, per indikator sasaran
- 2. Untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan 5 syarat minimal data kinerja berupa tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu :
 - Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
 - Membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
 - Uraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan
 - Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan
 - Analisis Efisiensi sumber daya (Anggaran)

B. Akuntabilitas Keuangan

- Menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa datang organisasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja 2022
- Pengukuran Kinerja 2022
- Realisasi Anggaran 2022

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAH

BIDANG PERUMAHAN

1. Masih banyak hunian/rumah yang kondisinya tidak layak huni
2. Masih terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan
3. Masih terbatasnya lahan yang siap bangun untuk dijadikan sebagai lahan perumahan

BIDANG PERMUKIMAN

1. Masih Luasnya Kawasan Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar
2. Masih Kurangnya PSU di Kawasan Kumuh
3. Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
4. Belum Optimalnya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG PERTANAHAN

1. Masih banyaknya tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat karena belum memiliki alas hak untuk proses pensertifikatan
2. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan terkait konflik tanah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Di dalam Renstra tertuang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024.

VISI

POLEWALI MANDAR
"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera"

Dan ditetapkan Empat (4) Misi Pembangunan

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Tabel 2.1

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perumahan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2. Penyediaan Hunian sewa yang layak huni dan terjangkau 3. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Formal Bersubsidi
Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan Kawasan Permukiman Kumuh 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Tanah Milik Pemerintah Daerah 2. Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemda

Tabel 2.2

Target Sasaran Strategis yang di tetapkan Dalam Renstra 2019-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	81,35	82,01	82,92	83,84	84,81	85,80	86,83
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh	57,66 Ha	0 Ha	21,49 Ha	11,05 Ha	11,74 Ha	13,38 Ha	0 Ha
3	Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat	22,22	22,89	38,05	53,02	67,85	82,56	97,19

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum

1. Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah
2. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
3. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Urusan Pertanahan

1. Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah

Sesuai hasil pemuktahiran program dan kegiatan ke Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka hasil pemampingan program yang dilaksanakan selama periode Renstra 2019 – 2024 untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Kawasan Permukiman
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

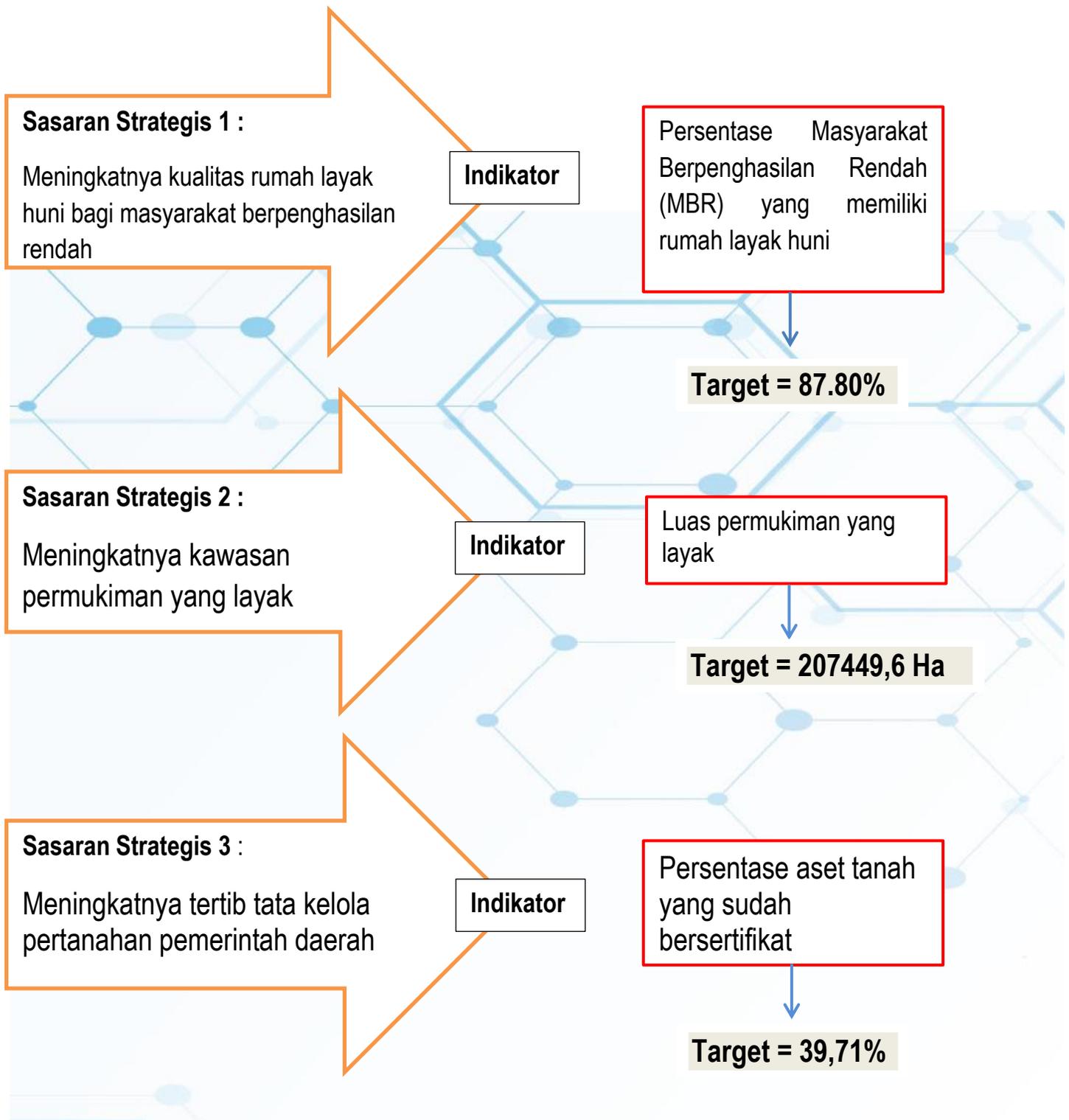
Urusan Pertanahan

4. Program Penatagunaan Tanah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala OPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Polewali Mandar sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Indikator

1

Predikat SAKIP perangkat daerah

Target = BB

2

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Target = 95.56%

3

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Target = Sangat Baik

PERJANJIAN

KINERJA



Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 merencanakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.847.750.347	APBD
2	Kawasan Permukiman	Rp 206.404.650	APBD
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 72.244.700	APBD
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 212.858.800	APBD
5	Pengembangan Perumahan	Rp 143.997.800	APBD
6	Penatagunaan Tanah	Rp 190.714.100	APBD
	JUMLAH	Rp 3.673.970.397	APBD



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik serta menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2024 serta menganalisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sebagai OPD yang melaksanakan Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Berdasarkan

PERMENDAGRI
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan., dan **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, adalah :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022

Penyediaan & rehatiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota

**Tabel 3.1
Capain SPM Tahun 2022**

Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)
Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	2	2	0	100

**Tabel 3.2
Mutur Pelayanan SPM Tahun 2022**

No	Indikator Pelayanan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu (%)
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0
2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0
3	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	2	2	0	100
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

Dengan adanya Bencana Banjir Bandang yang terjadi di Desa Riso Kecamatan Tapango pada tahun 2022, yang mengakibatkan 2 Rumah Masyarakat Rusak Berat.



Kondisi Rumah **An. Basri** yang rusak akibat Banjir Bandang di Desa Riso Kec. Tapango



Kondisi Rumah **An. Ma'dika** yang rusak akibat Banjir Bandang di Desa Riso Kec. Tapango



Penyerahan Buku Tabungan Kepada Masyarakat yang terdampak bencana Banjir di Kec. Riso

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022



Kondisi Rumah **An. Basri** setelah direlokasi dan mendapat bantuan pembangunan rumah



Kondisi Rumah **An. Ma'dika** setelah direlokasi dan mendapat bantuan pembangunan rumah



Penyerahan Upah Tukang Kepada Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Tabel. 3.3
Rincian Anggaran dan Program SPM Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaa		Capaian (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	108.997.800	73.997.800	67,89
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	108.997.800	73.997.800	67,89
	Sub Kegiatan : Pembangunan rumah bagi korban bencana	108.997.800	73.997.800	67,89

Tabel. 3.4
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2022

No	Indikator SPM	2021				2022			
		Target	Capain	Pagu	Realisasi	Target	Capain	Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	100%	Not Available (Tidak Bencana)	0	0	100%	100%		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	100%	Not Available (Tidak ada Kegiatan Relokasi)	0	0	100%	Not Available (Tidak ada Kegiatan Relokasi)	108.997.800	73.997.800



Tabel 3.5

Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM

Masalah	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulit melakukan pendataan terkait bencana ➤ Kelengkapan Dokumen Kependudukan Penerima Terkadang Hilang Terbawah Bencana ➤ Belum ada skema lokasi aman untuk Rumah Layak Huni ➤ Belum adanya regulasi yang mengatur berapa Persentase dari Pagu setiap tahunnya yang diberikan dalam pemenuhan SPM ➤ Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah ➤ Penguatan Tim Penerapan SPM Se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90/2019. ➤ Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas sehingga capaian SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata ➤ Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM

Mutu Pelayanan SPM PUPR

Layanan Rumah Bencana

Jenis		IP Barang	IP Barang	IP Barang	IP Jasa
		 Rehabilitasi	 Pembangunan Kembali	 Relokasi	 Bantuan Rumah Sewa
Mutu	Kuantitas	Sesuai Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
	Kualitas	Rumah layak huni sesuai NSPK	Rumah layak huni sesuai NSPK	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah layak huni sesuai NSPK; • Luas lantai min. 36 m²; • Luas tanah min. 60 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sewa rumah layak huni terjangkau; • Subsidi uang sewa 3 bulan setelah masa tanggap darurat
Penerima		Rumah rusak ringan, sedang	Rumah rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah rusak ringan, sedang, berat; • Ada SK Gubernur/Bupati/ Wali Kota ttg Relokasi Korban Bencana Alam 	Penghuni rumah sewa

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Indikator :

Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni



Berdasarkan hasil pengukuran untuk capaian SASARAN STRATEGIS I, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6
Realisasi Sasaran Strategis 1 2022

no	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	87,80%	90,26%	102%

Berdasarkan tabel diatas untuk realisasi **sasaran strategis I melebihi target, untuk target 2022 sebesar 87,80% dengan Realiasi 90,26 atau 102%**. capaian realisasi ini didukung oleh Kegiatan PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM (PKE) dari Balai Penyediaan Perumahan. Untuk Kabupaten Polewali Mandar jumlah bantuan PKE melalui kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 659 Unit yang tersebar di 5 Kecamatan. Dan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar melalui Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 228 Unit yang tersebar di 12 Kecamatan.

untuk tahun 2022 karena terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dari Dana DAU ditiadakan dan untuk Anggaran Dana DAK disesuaikan dengan Lokasi Prioritas, sehingga Kabupaten Polewali Mandar tidak mendapat alokasi Dana DAK karena tidak termasuk Lokasi Prioritas.

Uraian Capaian Evaluasi Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian PMK dan BKKBN. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain ada program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan. Program infrastruktur berbasis masyarakat yang meliputi penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, dan kota tanpa kumuh **dan Program Penyediaan Perumahan melalui Program BPS**. Untuk tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar mendapat bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Program BPS sebanyak 659 Unit yang terbagi dalam 2 Tahap

Tabel. 3.7
Daftar Penerima Bantuan PKE
Program BPS dari Balai Penyediaan Perumahan Tahun 2022

No.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
			659	
1	ALLU	KALUMAMMANG	31	PKE TAHAP 3
		MOMBI	6	PKE TAHAP 3
		PAO-PAO	17	PKE TAHAP 3
		PUPPURING	46	PKE TAHAP 3
		SAYOANG	16	PKE TAHAP 3
2	BULO	DAALA TIMUR	46	PKE TAHAP 3
		KAROMBANG	30	PKE TAHAP 3
		LENGGO	35	PKE TAHAP 3
		PATAMBANUA	32	PKE TAHAP 3
		SABURA	20	PKE TAHAP 3
3	LIMBORO	LEMBANG-LEMBANG	8	PKE TAHAP 3
		RENGGEANG	6	PKE TAHAP 3
		TANDASURA	17	PKE TAHAP 3
4	TINAMBUNG	BATULAYA	11	PKE TAHAP 3
5	TUTAR	BESOANGIN UTARA	11	PKE TAHAP 3
		PIRIANG TAPIKO	41	PKE TAHAP 3
		RATTE	18	PKE TAHAP 3
		KEL. TARAMANU	70	PKE TAHAP 3
		TARAMANU TUA	32	PKE TAHAP 3
		JUMLAH	493	
6	LIMBORO	KEL. LIMBORO	23	PKE TAHAP 2
		PENDDULANGAN	48	PKE TAHAP 2
7	TINAMBUNG	GALUNG LOMBOK	30	PKE TAHAP 2
		LEKOPADIS	31	PKE TAHAP 2
		SEPABATU	1	PKE TAHAP 2
		TANGA-TANGA	33	PKE TAHAP 2
		JUMLAH	166	

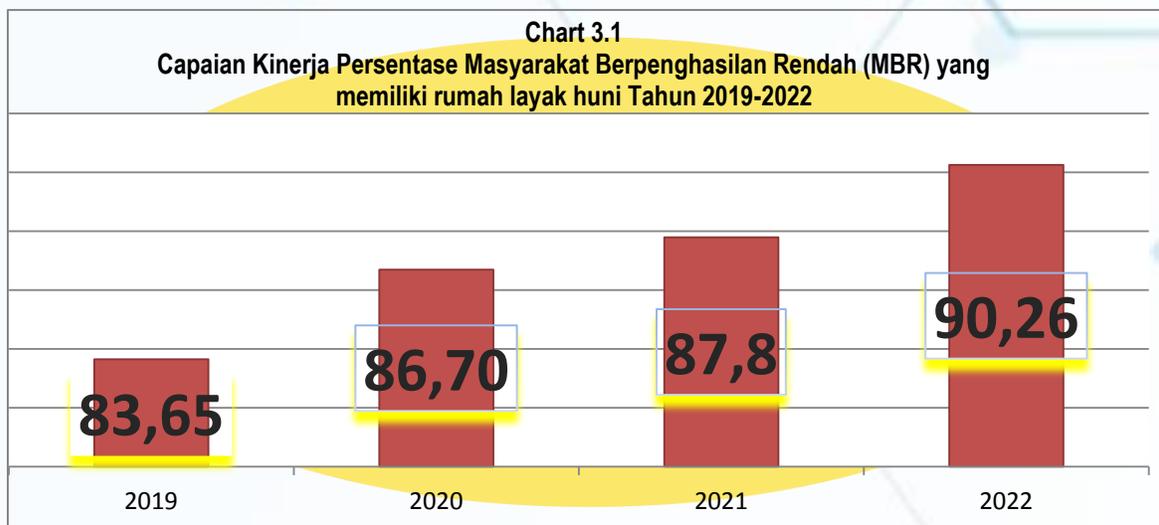
LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rutilahu. Penerima bantuan Rutilahu adalah Masyarakat Miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disingkat DTKS Kabupaten Polewali Mandar dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati. Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 228 Unit yang tersebar di 12 Kecamatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel. 3.8
Daftar Lokasi Penerima Bantuan
Rumah Tidak Layak Huni Lingkup Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH UNIT
1	BINUANG	MIRRING	12
2	BINUANG	MAMMI	10
3	POLEWALI	SULEWATANG	1
4	POLEWALI	LANTORA	1
5	POLEWALI	PEKKABATA	1
6	POLEWALI	DARMA	1
7	POLEWALI	POLEWALI	4
8	POLEWALI	MADATTE	1
9	POLEWALI	MANDING	1
10	POLEWALI	PEKKABATA	1
11	MATAKALI	MATAKALI	5
12	MATAKALI	BUNGA-BUNGA	5
13	MATAKALI	INDO MAKKOMBONG	5
14	MATAKALI	BARUMBUNG	5
15	MATAKALI	PATAMPANUA	5
16	WONOMULYO	BAKKA-BAKKA	5
17	WONOMULYO	CAMPURJO	5
18	WONOMULYO	BANUA BARU	5
19	WONOMULYO	NEPO	5
20	WONOMULYO	SUMBERJO	5
21	TAPANGO	BATU	15
22	TAPANGO	PALATTA	15
23	TAPANGO	BANATO REJO	5
24	MAPILLI	BONRA	7
25	MAPILLI	SEGERANG	7
26	MAPILLI	RUMPA	10

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH UNIT
27	LUYO	PUSSUI	10
28	LUYO	LUYO	7
29	LUYO	MAMBU	7
30	TUBBI TARAMANU	ARABUA	1
31	LIMBORO	RENGGEANG	10
32	LIMBORO	TANDASSURA	10
33	LIMBORO	TANGGAN BARU	10
34	LIMBORO	SALARRI	10
35	LIMBORO	LEMBANG-LEMBANG	10
36	TINAMBUNG	BATU LAYA	4
37	CAMPALAGIAN	LAPEO	1
38	ALU	SARAGIANG	6
Total			228



Tabel 3.9
 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Database RTLH	Unit	6.730	5.899	4.799	4400
2.	RTLH Tertangani	Unit	831	1.100	399	887
3.	Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	5.899	4.799	4.400	3513

Mencermati Chart 3.1 dan tabel 3.9 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah layak Huni merupakan program prioritas yang setiap tahunnya terus dilaksanakan. Sesuai dengan data pada tahun 2019 yang termuat dalam dokumen Renstra 2019-2024 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 6.730 Unit dan telah ditangani sampai tahun 2022 sebanyak 3.217 unit, sehingga jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 3513 Unit. Adapun sumber pembiayaan penanganan RTLH dapat kita lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.10
Sumber Pembiayaan RTLH Tahun 2019-2022 di Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Pembiayaan RTLH	Satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Dana Alokasi Umum	Unit	61	3	122	228
Dana Alokasi Khusus	Unit	170	147	87	
SNVT/Balai Penyediaan Perumahan	Unit	600	950	190	659
Sumber Lain	Unit				
Jumlah	Unit	831	1100	399	887

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tersedianya data e-RTLH sehingga memudahkan Tenaga Fasilitator mendata dan menyeleksi calon penerima bantuan rumah swadaya
2. Pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis terhadap masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya
3. Adanya peningkatan anggaran dari DAU serta adanya partisipasi dari stake holder untuk membantu masyarakat penerima bantuan rumah swadaya

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang belum terdata
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rumah yang layak huni
3. Menurunnya anggaran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman serta berkurangnya kuota penerima bantuan rumah swadaya dari Balai Penyedia Perumahan.

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Melakukan verifikasi Lapangan untuk memastikan kondisi rumah tidak layak huni sebelum dimasukkan kedalam e-RTLH
2. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan rumah swadaya
3. Menyediakan dana sharing untuk Anggaran DAK Perumahan dan Permukiman serta Operasional Pendukung Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari Balai Penyediaan Perumahan



Selain Program Pembangunan Rumah Layak Huni diatas, Dinas Perumahan, Permukiman juga Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung **pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu**

1. **Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian.** Yaitu Penyediaan Rumah susun sewa bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak 114 kamar. Dengan biaya sewa yang terjangkau. dalam hal pengelolaan Rusunawa terdiri dari Kepala Rusunawa dan Bendahara Rusunawa yang merupakan ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan dibantu oleh beberapa petugas yang diupah setiap bulan dengan sistem perjanjian kontak selama 1 (Tahun) yang terdiri dari : Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Instalator Listrik, Petugas Instalator Air
2. **Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.** merupakan Kegiatan membantu dan fasilitasi para pengembang (Developert) Perumahan Formal dalam penyedian PSU di Perumahan Formal. Untuk tahun 2022 Jumlah Perumahan Formal yang mendapat Bantuan Pembangunan PSU (Pembangunan Jalan Paving Blok) sebanyak 6 Perumahan.
 - a. Perumahan Al-Ikhlas Residence Permai (Lokasi Desa Patampanua, Kec. Matakali) sebanyak 56 Rumah.
 - b. Perumahan Bina Residence Permai (Lokasi Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo) sebanyak 50 Rumah.
 - c. Perumahan Riskita Permai (Lokasi Desa Patampanua, Kec. Matakali) sebanyak 50 Rumah
 - d. Perumahan Villa Berlian (Lokasi Kel. Pekkabata, Kec. Polewali) sebanyak 50 Rumah
 - e. Perumahan Polewali Bussines Center & Residence (Lokasi Kel. Madatte, Kec. Polewali) sebanyak 50 Rumah.
 - f. Perumahan Berlian Modern Residence (lokasi Kel. Madatte, Kec. Polewali) sebanyak 50 Rumah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Strategis 1 :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	226.388.200,-	226.340.300,-	99,98
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	226.388.200,-	226.340.300,-	99,98
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	178.566.900,-	178.566.900,-	100
	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	47.821.300,-	47.773.400,-	99,90

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak

Indikator

Luas Permukiman Yang Layak

Tabel. 3.11
Realisasi Sasaran Strategis 2 2022

no	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	207449,6 Ha	207453,4 Ha	100%

Luas Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar 207476 Ha dan luas Kawasan Kumuh dibawah Sepuluh (10) Ha sesuai kewenangan Kabupaten Polewali Mandar 57,6 Ha, untuk tahun 2022 luas kawasan kumuh yang tertangani sesuai dengan hasil koordinasi dengan Tim Kotaku dan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) seluas 7,73 Ha. Maka Total Luas Kawasan Kumuh yang telah tertangani sesuai dengan Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi target RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sampai tahun 2022 seluas 35 Ha. Sehingga Asumsi LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN POLEWALI Sampai Tahun 2022 (57,6 Ha – 35 Ha = 22,6 Ha). **Sehingga Luas Permukiman Yang Layak** Kondisi sampai Tahun 2022 seluas 207453,4 Ha (Melebihi dari target yang direncanakan 207449,6 Ha sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022).

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang termuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel. 3.12

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota	
2	Kawasan Permukiman	a	Penetapan sistem kawasan permukiman	a	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
		b	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	b	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Dan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pasal I Ayat 13”

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dan ayat 14 “Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 2/PRT/M/2016 tentang Aspek dan Kriteria Kawasan Kumuh yaitu :

1. Kondisi Bangunan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran

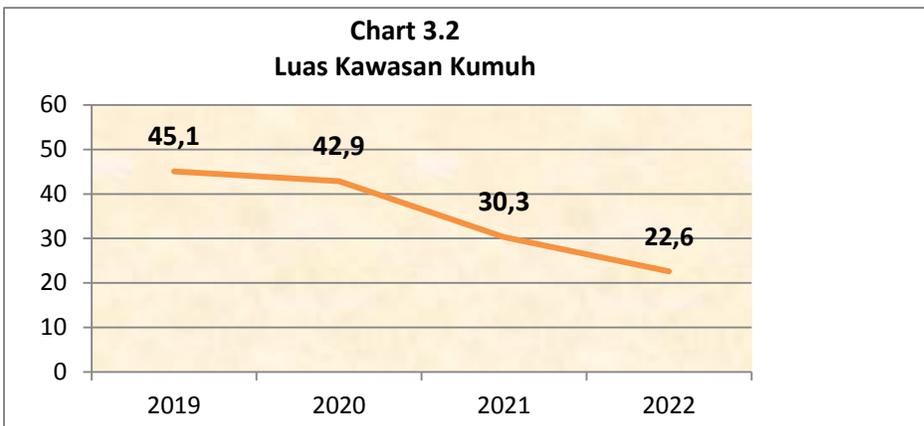
KOTA TANPA KUMUH

Tabel 3.13
Baseline Kawasan Kumuh yang menjadi Target RPJMD 2019-2024

KAWASAN KUMUH	Luas (Ha)		PENGURANGAN				SISA
			2019	2020	2021	2022	
CAMPALAGIAN		11,7					
Bonde	1,09						
dusun 5 psr baru	1,09					1,09	0,0
Kenje	2,0						
Dusun Ujungbaru	2,0						2,0
Lapeo	3,8						
Dusun Babatoa	3,8						3,8
Pappang	4,9						
dusun kampung baru	2,0						2,0
Dusun Ujung Timur	2,9						2,9
POLEWALI		32,5					
Darma	6,7						
Koppe	4,5				4,5	0,0	0,0
Pulele	2,2			2,2	0	0	0,0
Polewali	4,3						
Ujung	4,3		4,34				0,0
Sulewatang	21,4						
Conggo_Sarabakan	8,2		8,2				0,0
Pandebassi	8,0				8,0	0	0,0
Tirondo	5,2						5,2
TINAMBUNG		7,6					
Karama	3,3						
dusun karama	1,8					1,8	0,0
Dusun Manjopai	1,5				0	0	1,5
Sepabatu	3,4						
dusun 2 sepabatu	3,4						3,4
Tangga-tangga	0,9						
dusun ga'de	0,9						0,9
WONOMULYO		5,8					
Banuabaru	0,5						
Dusun 4 Banuabaru	0,5						0,5
Sidodadi	3,4						
lingk 1 sidodadi	0,7					0,74	0,0
lingk 2 sidodadi	0,6					0,6	0,0
lingk 3 sidodadi	1,6					1,6	0,0
lingk 5 sidodadi	0,5						0,5

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

KAWASAN KUMUH	Luas (Ha)		PENGURANGAN				SISA
			2019	2022	2021	2022	
Sugiharas	1,87						
dusun 1 sugiwaras	0,60					0,6	0,0
dusun 4 sugiwaras	1,27					1,27	0,0
JUMLAH	57,6	57,6	12,54	2,20	12,52	7,73	22,6



luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai tahun 2022 seluas 35 Hekter, Sesuai data tabel dan Chart diatas, maka luas kawasan kumuh dibawah 10 Hekter sebesar 22,6 Hekter yang tersebut di Empat (4) Kecamatan yaitu Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung,

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Penanganan Kawasan Kumuh dilaksanakan oleh beberapa OPD
- Tersedianya SK Kumuh, sebagai dasar pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.

Faktor Penghambat :

- Masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman khususnya PERDA KUMUH , yang menjad Persyaratan/ RC (Readness Criteria) dalam pengusulan Program dan Kegiatan penangan kawasan kumuh ke Pusat.

Alternatif / Solusi yang diupayakan

- Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh dapat lebih terpantau dan terstruktur sesuai dengan aspek kekumuhan disetiap kawasan kumuh.
- Melakukan Rapat Evaluasi bersama Pokja PKP untuk mengetahui progres penanganan kawasan kumuh.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2.

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	206.404.650,-	205.818.450,-	99,72
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	98.825.600,-	98.777.600,-	99,95
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	98.825.600,-	98.777.600,-	99,95
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	107.579.050,-	107.040.850,-	99,50
	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	107.579.050,-	107.040.850,-	99,50



Pembangunan PSU (Pembuatan Draenase) di Kawasan Kumuh Kel. Sidodadi



Rapat Pembahasan Ranperda RP3KP di Kantor Kemenkumham Prov. Sulbar

Pemerintah Kabupaten POLEWALI MANDAR

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR

RAPAT KOORDINASI EVALUASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

POLEWALI, 7 DESEMBER 2022

DISRUMKIMTAN Polman Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Program POKJA PKP

Terkait Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISRUMKIMTAN) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan wadah perkumpulan para pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan rencana secara komprehensif, dan untuk menjawab isu penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman di Kabupaten Polewali Mandar.

Aula Sipamandaq Balitbangren, 07 Desember 2022

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah

Indikator

Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat

Tabel. 3.14
Realisasi Sasaran Strategis 3 2022

no	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	39,71%	41,10	103,5%

Luas tanah pemda kondisi tahun 2021 seluas 6.859.110,45 M² dan Jumlah pengadaan tanah untuk tahun 2022 sebanyak 1 Persil yang diperuntukkan untuk Penambahan Perluasan Puskesmas Bulu dengan Luas 2.853 M². sehingga total tanah pemda sampai tahun 2022 seluas 6.861.963,45 M².

Untuk tahun 2022 sasaran target 3 luas tanah pemda yang bersertifikat ditargetkan seluas 2.724.885,69 M² atau 39,71% dari total luas tanah pemda 6.861.963,45 M². dan untuk pengukuran realisasi kinerja sasaran strategis 3 seluas 2.819.955,48 M² atau sebesar 41,10% (melebihi target yang telah ditetapkan).

Tabel. 3.15
Data Pengadaan Tanah Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	PERUNTUKAN	LUAS TANAH (M ²)	LUAS TANAH (Ha)
1	BULO	BULO	PENAMBAHAN PERLUASAN PUSKESMAS BULO	2.853	0,28
JUMLAH				2.853	0,28

Tabel. 3.16
Data Pengadaan Tanah Tahun 2019 - 2021

No	Lokasi	Peruntukan	Luas Tanah (M2)
1	2	3	4
2019			
1	Kec. Polewali	Pekuburan Madatte	4,198
2	Kec. Tapango	Kantor Camat Tapango	357
3	Kec. Tinambung	Kantor Camat Tinambung	12,671
4	Kec. Balanipa	SD 044 Kp. Baru Subik	2,045
5	Binuang	Puskesmas Polewali	964
6	Binuang	TPS Skala Kota	925
7	Wonomulyo	Pelebaran Jalan Wonomulyo	22,507
8	Kec. Polewali	Masjid dan Pusat Dakwah Islam	14,039
Jumlah			57,706
2020			
1	Matakali	Puskesmas Matakali	6.268
2	Anreapi	Puskesmas Anreapi	4.547
3	Matangnga	Puskesmas Matangnga	3.679
Jumlah			14.494
2021			
1	Balanipa	Puskesmas Balanipa	4.292
2	Balanipa	Kantor Camat Balanipa	6.390
3	Tinambung	Sport Center Tinambung	47.158
Jumlah			57.840

Tabel 3.17
Data Penerimaan Sertifikat Tahun 2022

No	Sertipikat		Luas (M ²)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab./Kota	Penggunaan
	Tanggal	Nomor					
1	23-12-2021	HP.08	2.364	Ds. Bulo	Bulo	Kab.Polman	PASAR BULO
2	23-12-2021	HP.11	1.416	Ds. Alu	Alu	Kab.Polman	KANTOR BPP ALU
3	28-10-2021	HP.15	1.972	Kel. Taramanu	Tutar	Kab.Polman	PUSKESMAS TUTAR
4	22-12-2021	HP.23	2.138	Kel. Matakali	Matakali	Kab.Polman	PEKUBURAN UMUM
5	23-11-2021	HP.05	4.411	Ds. Riso	Tapango	Kab.Polman	SDN 044 INPRES RISO
6	23-11-2021	HP.14	1.390	Ds. Batulaya	Tinambung	Kab.Polman	PUSKESMAS TINAMBUNG
7	22-12-2021	HP.03	438	Ds. Piriang Tapiko	Tutar	Kab.Polman	PUSTU PERIANG TAPIKO
8	10-11-2021	HP.01	2.691	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
9	10-11-2021	HP.02	1.510	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
10	10-11-2021	HP.03	1.052	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
11	10-11-2021	HP.04	1.944	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
12	10-11-2021	HP.05	2.736	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
13	10-11-2021	HP.06	2.105	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
14	10-11-2021	HP.07	2.659	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
15	10-11-2021	HP.08	2.204	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
16	10-11-2021	HP.09	314	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
17	10-11-2021	HP.10	986	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
18	10-11-2021	HP.11	745	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
19	10-11-2021	HP.12	320	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
20	10-11-2021	HP.13	570	Ds. Bunga-Bunga	Matakali	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
21	18-11-2021	HP.02	201	Ds. Karombang	Bulo	Kab.Polman	POSKESDES
22	18-01-2022	HP.57	1.301	Kel. Madatte	Polewali	Kab.Polman	PUSTU MADATTE
23	05-01-2022	HP.07	113	Ds. Tubbi	Tutar	Kab.Polman	PUSTU TUBBI

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

No	Sertipikat		Luas (M ²)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab./Kota	Penggunaan
	Tanggal	Nomor					
24	05-01-2022	HP.30	43.639	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	RUMAH SAKIT PRATAMA WONOMULYO
25	05-01-2022	HP.31	4.482	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	GUDANG SRG (SISTEM RESI GUDANG)
26	18-01-2022	HP.56	800	Kel. Madatte	Polewali	Kab.Polman	UPTD METEOROLOGI
27	19-08-2020	HP.00131	640	Kel. Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta	ASRAMA MAHASISWA PUTERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
28	14-10-2021	HP.07	538	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
29	14-10-2021	HP.08	1.459	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
30	14-10-2021	HP.09	1.468	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
31	14-10-2021	HP.10	742	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
32	14-10-2021	HP.11	3.616	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
33	14-10-2021	HP.12	4.834	Ds. Campurjo	Wonomulyo	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
34	14-12-2021	HP.17	4.003	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
35	14-12-2021	HP.18	890	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
36	14-12-2021	HP.19	586	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
37	14-12-2021	HP.20	835	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
38	22-12-2021	HP.21	1.259	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
39	14-12-2021	HP.22	339	Kel. Pelitakan	Tapango	Kab.Polman	JALAN KABUPATEN
40	08-07-2022	HP.01	173	Ds. Sepporakki	Bulo	Kab.Polman	POSKESDES SEPPORAKKI
41	08-07-2022	HP.01	192	Ds. Ihing	Bulo	Kab.Polman	POSKESDES IHING
42	15-07-2022	HP.32	621	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	TK PEMBINA SIDODADI

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

No	Sertipikat		Luas (M ²)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab./Kota	Penggunaan
	Tanggal	Nomor					
43	15-07-2022	HP.09	418	Ds. Pulliwa	Bulo	Kab.Polman	POSKESEDES PULLIWA
44	09-12-2022	HP.08	187	Kel. Pappang	Campalagian	Kab.Polman	POSKESEDES PAPPANG
45	09-12-2022	HP.04	511	Ds. Luyo	Luyo	Kab.Polman	KANTOR DESA LUYO
46	09-12-2022	HP.13	160	Ds. Lampoko	Campalagian	Kab.Polman	POSKESEDES LAMPOKO
47	09-12-2022	HP.05	338	Ds. Tuttula	Tapango	Kab.Polman	POSKESEDES TUTTULA
48	14-11-2022	HP.10	135	Ds. Parappe	Campalagian	Kab.Polman	POSKESEDES PARAPPE
49	12-09-2022	HP.02	170	Ds. Kalimbia	Tapango	Kab.Polman	POSKESEDES KALIMBIA
50	10-10-2022	HP.02	263	Ds. Palatta	Tapango	Kab.Polman	POSKESEDES PALATTA
51	23-08-2022	HP.05	171	Ds. Indomakkombong	Matakali	Kab.Polman	PUSTU INDOMAKKOMBONG
52	22-08-2022	HP.04	219	Ds. Barumbung	Matakali	Kab.Polman	POSKESEDES BARUMBUNG
53	01-08-2022	HP.06	276	Ds. Galeso	Wonomulyo	Kab.Polman	POSKESEDES MAMPIE
54	14-10-2022	HP.34	1.161	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	KANTOR PEMASARAN UPTD BAAI BENIH PADI
55	14-10-2022	HP.33	218	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	UPTD INSEMINASI
56	14-10-2022	HP.35	305	Kel. Sidodadi	Wonomulyo	Kab.Polman	PERUMAHAN DINAS BPP

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, Jumlah persil penerimaan sertifikat tahun 2022 sebanyak 56 Persil dengan total Luasan 111.228 M², yang terdiri dari :

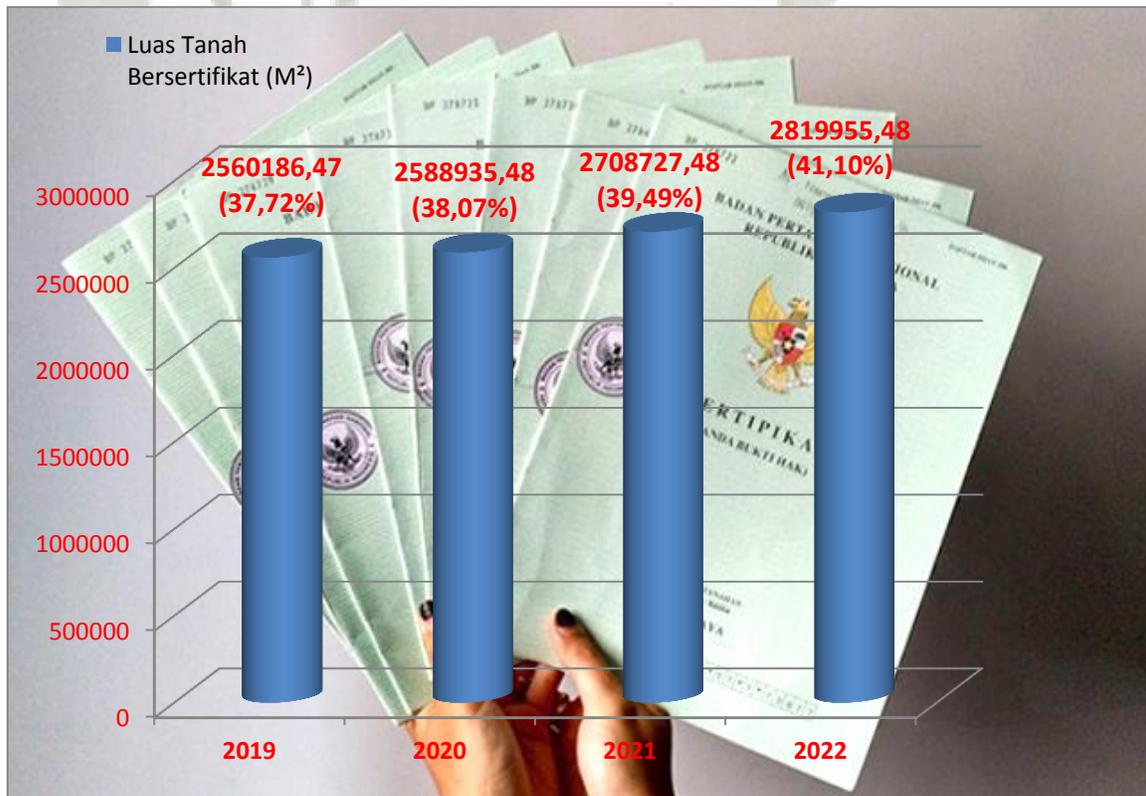
1. Kec. Alu 1 Bidang dengan luas 1.416 M²
2. Kec. Bulo 5 Bidang dengan luas 3.348 M²
3. Kec. Campalagian 3 Bidang dengan luas 482 M²
4. Kec. Luyo 1 Bidang dengan luas 511 M²
5. Kec. Matakali 16 Bidang dengan luas 22.364 M²
6. Kec. Mergangsan 1 Bidang dengan luas 640 M²
7. Kec. Polewali 2 Bidang dengan luas 2.101 M²
8. Kec. Tapango 10 Bidang dengan luas 13.094 M²
9. Kec. Tinambung 1 Bidang dengan luas 1.390 M²
10. Kec. Tutar 3 Bidang dengan luas 2.523 M²
11. Kec. Wonomulyo 13 Bidang dengan luas 63.359 M²

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

Tabel 3.18
Data Luasan Tanah Pemda Bersertifikat Kab. Polewali Mandar Sampai Tahun 2022

No	KECAMATAN	LUAS TANAH (M ²)	LUAS TANAH (Ha)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	LUAS TANAH (M ²)	LUAS TANAH (Ha)
1	ALU	47.217,00	4,72	1.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.633,00	4,86
2	ANREAPI	43.021,00	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.021,00	4,30
3	BALANIPA	65.182,00	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.182,00	6,52
4	BINUANG	98.190,00	9,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.190,00	9,82
5	BULO	32.862,00	3,29	2.565	-	-	-	-	-	783	-	-	-	-	-	36.210,00	3,62
6	CAMPALAGIAN	121.024,49	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482	121.506,49	12,15
7	LIMBORO	34.652,00	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.652,00	3,47
8	LUYO	85.842,93	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	86.353,93	8,64
9	MAPILLI	872.204,00	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.204,00	87,22
10	MATAKALI	96.235,00	9,62	21.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	118.599,00	11,86
11	MATANGNGA	33.544,89	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.544,89	3,35
12	POLEWALI	679.823,00	67,98	1.301	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.924,00	68,19
13	TAPANGO	70.160,00	7,02	4.411	-	-	-	-	-	7.912	-	-	-	-	771	83.254,00	8,33
14	TINAMBUNG	102.494,93	10,25	1.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.884,93	10,39
15	TUTAR	120.904,00	12,09	2.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.427,00	12,34
16	WONOMULYO	201.755,24	20,18	43.639	4.482	-	-	-	-	13.278	-	-	-	-	1.960	265.114,24	26,51
17	LUAR KABUPATEN	3.615,00	0,36	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.255,00	0,43
JUMLAH		2.708.727,48	270,87	79.219	5.922	-	-	-	-	21.973	-	-	-	-	4.114	2.819.955,48	282,00
JUMLAH LUASAN (M²) PENERIMAAN SERTIPIKAT SELAMA BULAN JANUARI-DESEMBER 2022				111.228													

Chart 3.3
Luas Tanah Pemda Bersertifikat 2019-2022



Berdasarkan chart 3.3 diatas , persentase tanah pemda yang bersertifikat yang hanya 41,10% dari total luas tanah pemda 6.861.963,45 M². proses pengusulan dokumen untuk pendaftaran pensertifikatan HPI mengalami beberapa hambatan karena kelengkapan beberapa dokumen untuk pendaftaran pensertifikatan HPI masih kurang sehingga perlu dilengkapi, sesuai hasil pendataan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa lokasi tanah milik pemda yang diklaim oleh oknum atau organisasi yang dapat menimbulkan konflik/sengketa, sehingga pengusulan untuk pensertifikatan mengalami hambatan karena lokasi tanah tersebut masih perlu diselesaikan terlebih dahulu. maka Bidang Pertanahan melakukan fasilitasi dengan oknum/organisasi yang melakukan klaim lokasi dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bidang Aset Badan Keuangan, Aparat Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar.

Tabel 3.19
Data Penanganan Sengketa Kab. Polewali Mandar Tahun 2022

No	Waktu	Pihak Pengadu/Pelapor	Pihak Terlapor	Obyek Sengketa (Peruntukan, Letak)	Pokok Permasalahan	Bentuk Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
1	Maret 2022	Hamzah Nare	Pemda	Lokasi Pintu Gerbang Polewali Kec. Binuang	Tindak lanjut penyelesaian tukar guling lokasi pintu gerbang	Telah melakukan rapat dengan OPD terkait, berkoordinasi bagian hukum terkait penerbitan SK
2	Maret 2022	Kahar S	Pemda	Lokasi Pustu Patampanua Desa Patampanua Kec. Matakali	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik warga	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan dinkes terkait pensertifikatan lokasi dimaksud
3	Maret 2022	Salmon	Pemda	Lokasi Relokasi Rusunawa Kel. Madatte Kec. Polewali	Tindak lanjut penyelesaian pemindahan lokasi relokasi Rusunawa (an. Salmon)	Telah melakukan rapat dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum
4	April 2022	Kades Paku	Salah satu warga Desa Paku	Lokasi Pasar dan Lapangan Desa Paku Kecamatan Binuang	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik warga	Survey lokasi, rapat dan melakukan kunjungan ke warga yang mengklaim lokasi tersebut. Berkoordinasi dengan Desa dan Bagian Hukum Setda
5	April 2022	Masyarakat	Pemda	Lokasi TK Pembina Sarampu Desa Kuajang Kecamatan Binuang	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik warga	Telah dilakukan penelusuran data dan koordinasi dengan Bidang Aset Bakeu
6	Februari 2022	Masyarakat	Pemda	Lokasi SD 050 Pappang Kel. Pappang Kecamatan Campalagian	Adanya klaim bahwa lokasi tersebut adalah milik warga	Telah dilakukan penelusuran data dan koordinasi dengan Bidang Aset Bakeu

Sengketa Lahan

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tersedianya daftar rincian barang milik daerah (aset) tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat dalam Data Base Simda Bidang Aset Badan Keuangan sehingga memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pendataan lapangan untuk mempercepat proses pensertifikatan

Faktor Penghambat :

1. Belum lengkapnya dokumen aset tanah yang akan diusulkan untuk pembuatan sertifikat
2. Masih banyaknya lokasi yang diklaim oleh oknum atau organisasi tertentu sehingga perlu dilakukan penyelesaian sengketa/konflik.

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Melakukan kerjasama dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.
2. Membentuk Tim percepatan sertifikasi tanah milik pemda yang terdiri dari : BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar, Bidang aset Badan Keuangan, Badan Pendapatan dan OPD terkait serta Pemerintah setempat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3.

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.713.900,-	205.818.450,-	85,23
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparaannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	275.713.900,-	234.991.880,-	85,23
	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	233.400.400,-	193.039.000,-	82,17
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	42.313.500,-	41.952.880,-	99,15



Mengecek Aset Sport Center di
Kec. Tinambung



Survey Lokasi Penambahan
Perluasan Puskesmas Bulu



PTSL Jalan Kec. Wonomulyo

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Indikator

1. Predikat SAKIP perangkat
2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
3. Indeks kepuasan penggunaan pelayanan publik perangkat daerah

Tabel 3.20
Realisasi Sasaran Strategis 4 2022

no	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	100
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	95,56	95,56	100
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Indikator 1 : Predikat Sakip Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Komponen Yang Dinilai	2019	2021	2022
	Nilai	Nilai	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	29,10	29,40	28,90
b. Pengukuran Kinerja	22,19	22,50	22,81
c. Pelaporan Kinerja	9,99	10,25	10,25
d. Evaluasi Internal	5,20	5,08	5,20
e. Capaian Kinerja	11,50	10,50	9,50
Nilai Hasil Evaluasi	77,97	77,73	76,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB

Mencermati capaian implementasi SAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tersaji pada tabel di atas, terdapat Komponen penilaian yang mengalami penurunan yaitu komponen Capaian Kinerja sehingga nilai hasil evaluasi mengalami penurunan nilai. Dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja bertahan dengan Predikat BB

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator 1

Faktor Penunjang :

1. Tersedianya aplikasi e-SAKIP
2. Tersedia aplikasi SIMKINERJA
3. Tersedianya Cascading (Perencanaan Kinerja secara berkala)

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja
2. belum tertibnya pengelolaan data kinerja sehingga memperlambat laporan capaian kinerja

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Meningkatkan Koordinasi melalui pelaksanaan rapat-rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi kinerja.
2. Menyediakan kelengkapan data-data kinerja Dinas, sehingga memudahkan dalam pelaporan capaian kinerja.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4 untuk Indikator 1 sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.264.600 ,-	14.264.600 ,-	100
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.264.600 ,-	14.264.600 ,-	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.829.100,-	2.829.100,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.889.800 ,-	7.889.800,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.545.700 ,-	3.545.700,-	100

Indikator 2 : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan melaksanakan tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, maka diharapkan pada saat adanya pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK tidak terdapat temuan sehingga hasil penilaian dari BPK kembali mendapat opini / predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator 2

Faktor Penunjang :

1. Adanya Aplikasi SIPD yang Terintegrasi
2. Adanya Aplikasi SIMDA yang membantu dalam penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keuangan secara bertahap
4. Tingginya Komitmen seluruh jajaran ASN dan PTT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Faktor Penghambat :

1. Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan keuangan
2. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual
3. Belum optimalnya tertib administrasi aset

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Meningkatkan Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan pelaporan keuangan berbasis akrual dan pelaporan asset
2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4 untuk Indikator 2 sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.775.819,-	2.532.817.730,-	96,24
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.631.775.819,-	2.532.817.730,-	96,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.617.728.219,-	2.518.770.130,-	96,22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.047.600,-	14.047.600,-	100

Indikator 3 : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Untuk memastikan tercapainya indikator “ Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah” Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan mendapatkan pelayanan terbaik terutama dari segi efisiensi waktu.

Faktor Penunjang :

1. Tingginya Motivasi ASN untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat/stakeholder
2. Berkembangnya Teknologi dan Informasi, sehingga memudahkan memberikan informasi kepada Masyarakat/stakeholder

Alternatif / Solusi yang diupayakan :

1. Penataan Ruang Front Office sebagai pusat pemberian pelayanan
2. Membuat Struktur Organisasi Pelayanan, yang terdiri dari perwakilan setiap bidang sehingga memudahkan Masyarakat/Stakeholder dari mencari informasi kegiatan Dinas
3. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja

Faktor Penghambat :

1. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang kurang layak
2. Masih kurangnya Tenaga ASN, sehingga menghambat pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat/stakeholder
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga pelayanan yang diberikan kadang kurang memuaskan

Sudah baikkah layanan kami ?

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4 untuk Indikator 3 sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	402.641.150,-	399.015.980,-	99,09
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.031.400	225.832.650	99,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.078.200,-	1.078.200,-	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.265.300,-	18.264.100,-	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.210.000,-	9.210.000,-	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.849.000,-	6.849.000,-	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.628.900,-	190.431.350,-	99,90
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.188.500,-	8.188.500,-	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.188.500,-	8.188.500,-	100,00
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.279.350,-	80.069.030,-	96,15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.236.200,-	11.230.050,-	99,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.205.350,-	38.001.880,-	92,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.837.800,-	30.837.100,-	100,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.141.900,-	84.925.800,-	99,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.538.800,-	74.322.800,-	99,71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2.003.100,-	2.003.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.600.000,-	8.600.000,-	100,00

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Total Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 Rp. 3.959.901.419,-

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 Rp. 3.780.759.540,-

Dengan persentase Realisasi sebesar 95,48%.

Tabel 3.21

Realiasi Program Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISAI	%
	Rp.	Rp.	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.681.569	2.946.098.310	96,64
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	108.997.800	73.997.800	67,89
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	206.404.650	205.818.450	99,72
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	93.715.300	93.512.800	99,78
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	226.388.200	226.340.300	99,98
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.713.900	234.991.880	85,23
	3.959.901.419	3.780.759.540	95,48

Untuk lebih mengetahui Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja yang dihasilkan tahun 2022, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22

Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022

N O	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (RP)	% Rp.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.681.569	2.946.098.310	96,64	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	100		
						Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100		
						Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	100		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	108.997.800	73.997.800	67,89		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100		Program SPM Bidang Perumahan Rakyat
						Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	206.404.650	205.818.450	99,72	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	100	0,28	

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

N O	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% Rp.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)	KET
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	93.715.300	93.512.800	99,78	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	102	2,12	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	226.388.200	226.340.300	99,98					
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.713.900	234.991.880	85,23	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	103,5	18,27	
JUMLAH		3.959.901.419	3.780.759.540	95,48			100,79	4,52	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita cermati rata-rata realisasi kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 sebesar 100,79, dengan penggunaan anggaran yang terealisasi 95,48%, maka hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,54%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang termuat di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok, fungsi. Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan meski adanya penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat dijalankan secara maksimal,

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan 'Berhasil'. hal ini dapat ditunjukkan dengan rata – rata pencapaian indikator sasaran strategis sebesar 100,79%, dan realisasi keuangan sebesar 95,48%.

B. LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Walaupun Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dinyatakan Berhasil, tapi tidak dapat dipungkiri masih banyak dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun yang akan datang yaitu :

LAKIP DINAS RUMKIMTAN 2022

1. Menyediakan Dana Sharing (Dana APBD Kabupaten) untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
2. Memberikan tanggung jawab penuh kepada bidang permukiman dalam penanganan kawasan kumuh.
3. Memprioritas pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan.
4. Bagi Instansi yang membutuhkan lahan/lokasi untuk kepentingan umum agar mengajukan proposal pengadaan tanah sehingga dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan tanah untuk tahun berikutnya.
5. Peningkatan Koordinasi dengan BPN dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Pensertifikatan Tanah Milik Pemda dapat dipercepat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 disusun. Saran dan kritik yang sifatnya koreksi membangun, sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP selanjutnya.

Polewali, 10 Februari 2023

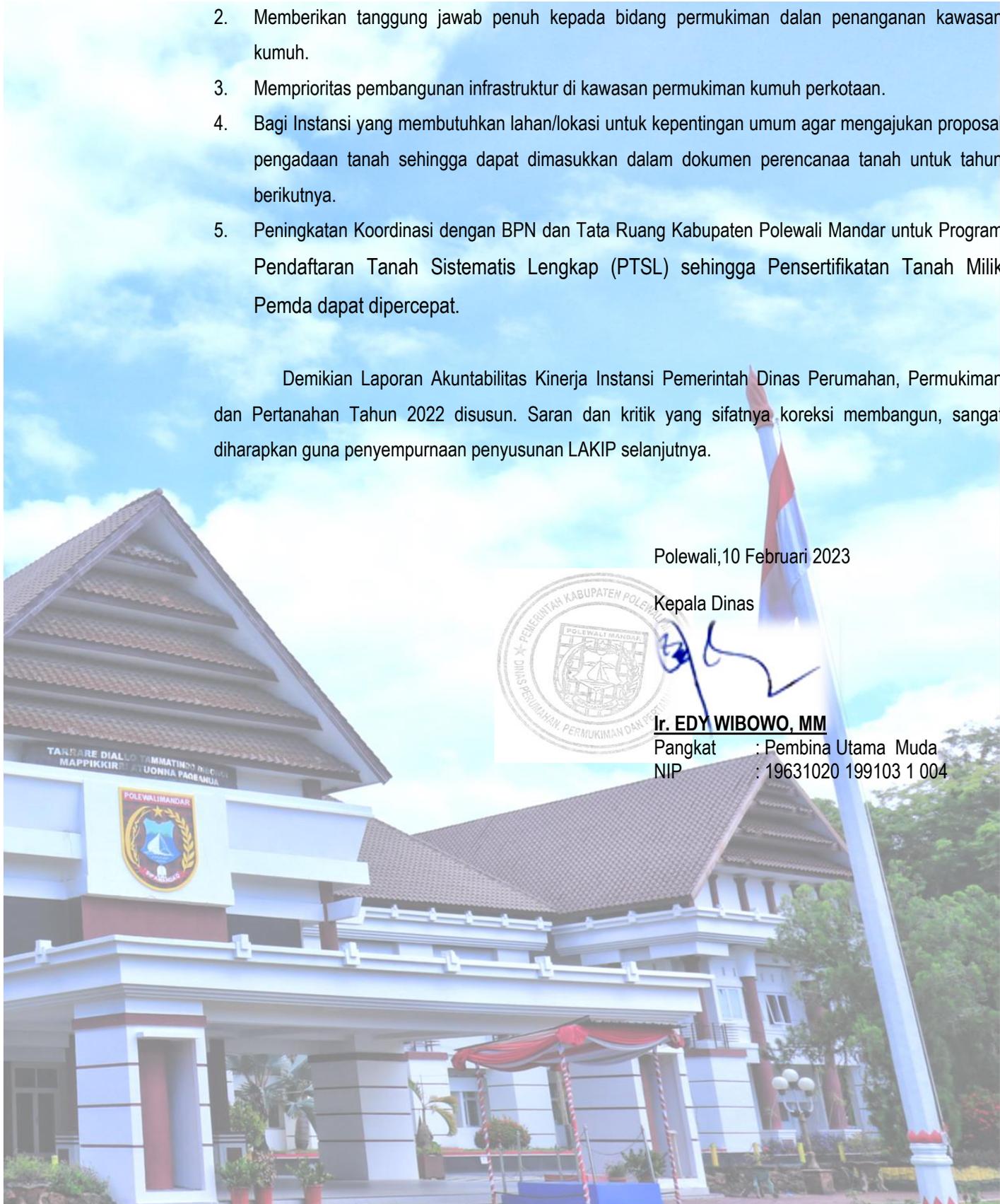
Kepala Dinas



Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631020 199103 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. K. H. Wahid Hasyim Nomor 3 Pekkabata, Kode Pos 91314
Telepon. 0428-21087 Faks. 0428-21087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. EDY WIBOWO, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631020 199103 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	87.80%	87.80%
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	207445,7 Ha	207449,6 Ha
3	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	39.49%	39.71%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	90%	95.56%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,847,750,347	APBD
2	Kawasan Permukiman	Rp 206,404,650	APBD
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 72,244,700	APBD
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 212,858,800	APBD
5	Pengembangan Perumahan	Rp 143,997,800	APBD
6	Penatagunaan Tanah	Rp 190,714,100	APBD
JUMLAH		Rp 3,673,970,397	APBD

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,



Ir. EDY WIBOWO, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631020 199103 1 004

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni	87,80%	90,26%	102	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
					Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
					Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	93.715.300,-	93.512.800,-	99,78
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	226.388.200,-	226.340.300,-	99,98
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	226.388.200,-	226.340.300,-	99,98
					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	178.566.900,-	178.566.900,-	100
					Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	47.821.300,-	47.773.400,-	99,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak	Luas permukiman yang layak	207449,6 Ha	207453,4 Ha	100	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	206.404.650,-	205.818.450,-	99,72
					Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	107.579.050,-	107.040.850,-	99,95
					Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	107.579.050,-	107.040.850,-	99,95
					Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	98.825.600,-	98.777.600,-	99,95
					Sub Kegiatan :Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	98.825.600,-	98.777.600,-	99,95
Meningkatkan Kualitas Penataan pertanahan pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat daerah	39,71%	41,10	103,5%	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.713.900,-	234.991.880,-	85,23
					Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparaannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	275.713.900,-	234.991.880,-	85,23
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	233.400.400,-	193.039.000,-	82,17
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	42.313.500,-	41.952.880,-	99,15

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.681.569	2.946.098.310	96,64
1.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.264.600	14.264.600	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.829.100	2.829.100	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.889.800	7.889.800	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.545.700	3.545.700	100,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.631.775.819	2.532.817.730	96,24
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.617.728.219	2.518.770.130	96,22
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.047.600	14.047.600	100,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.031.400	225.832.650	99,91
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.078.200	1.078.200	100,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.265.300	18.264.100	99,99
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.210.000	9.210.000	100,00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.849.000	6.849.000	100,00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.628.900	190.431.350	99,90
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.188.500	8.188.500	100,00
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.188.500	8.188.500	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.279.350	80.069.030	96,15
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.236.200	11.230.050	99,95
15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.205.350	38.001.880	92,23
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.837.800	30.837.100	100,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.141.900	84.925.800	99,75
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.538.800	74.322.800	99,71

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.003.100	2.003.000	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.600.000	8.600.000	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	108.997.800	73.997.800	67,89
2.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	108.997.800	73.997.800	67,89
2.1.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	108.997.800	73.997.800	67,89
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	206.404.650	205.818.450	99,72
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	98.825.600	98.777.600	99,95
3.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	98.825.600	98.777.600	99,95
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	107.579.050	107.040.850	99,50
3.2.1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	107.579.050	107.040.850	99,5
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	93.715.300	93.512.800	99,78
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	93.715.300	93.512.800	99,78
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	93.715.300	93.512.800	99,78
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	226.388.200	226.340.300	99,98
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	226.388.200	226.340.300	99,98
5.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	178.566.900	178.566.900	100,00
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	47.821.300	47.773.400	99,90

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.713.900	234.991.880	85,23
6.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	275.713.900	234.991.880	85,23
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	233.400.400	193.039.000	82,71
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	42.313.500	41.952.880	99,15
JUMLAH		3.959.901.419	3.780.759.540	95,48